

TINGKAT PERKEMBANGAN DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS DUURSTEDE KECAMATAN SAPARUA

DEVELOPMENT LEVEL AND PRIORITIES OF THE COMMUNITY SUPERVISORY GROUP IN DUURSTEDE SAPARUA DISTRICT

Yoisye Lopulalan*, Yofita Anaktototy

Program Studi Agrobisnis Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pttimura

*Penulis korespondensi: oislopu21@gmail.com

Diterima 4 September 2025, disetujui 2 Desember 2025

ABSTRAK

Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan menuntut peran aktif masyarakat, khususnya melalui kelompok masyarakat pengawas. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat perkembangan serta menentukan prioritas pengembangan kelompok masyarakat pengawas Duurstede di Kecamatan Saparua. Penelitian dilaksanakan pada Juni–Agustus 2024 menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, kuesioner, dan FGD dengan seluruh anggota (40 responden). Analisis kelembagaan menggunakan Institutional Development Framework (IDF) untuk menilai enam karakteristik sumber daya: pengembangan visi, manajemen, sumber daya manusia, keuangan, hubungan eksternal, pengawasan kelautan–perikanan, serta sarana prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perkembangan kelompok masyarakat pengawas Duurstede masih berada pada tahap permulaan (40,35%), dengan sebagian kecil komponen pada tahap perkembangan (19,30%), konsolidasi (22,81%), dan keberlanjutan (17,54%). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelompok masyarakat pengawas Duurstede membutuhkan penguatan kelembagaan yang komprehensif, terutama pada penyediaan sarana prasarana, pendanaan operasional, dan peningkatan kapasitas anggota. Pemerintah dan lembaga pendamping direkomendasikan untuk memperkuat pembinaan, pelatihan, dan dukungan fasilitas guna meningkatkan efektivitas peran kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Kata kunci: kelompok masyarakat pengawas, pengawasan sumberdaya, kelembagaan, IDF, saparua.

ABSTRACT

Sustainable management of marine and fisheries resources requires active community participation, particularly through community supervisory groups. This study aims to analyze the development level and determine the development priorities of the community supervisory group Duurstede in Saparua District. The research was conducted from June to August 2024 using qualitative methods through interviews, questionnaires, and focus group discussions involving all the members (40 respondents). Institutional analysis employed the Institutional Development Framework to assess six resource characteristics: vision development, management, human resources, finance, external relations, marine–fisheries surveillance, and infrastructure. The results show that the development level of the community supervisory group Duurstede remains at the initial stage (40.35%), with smaller portions of components at the developing stage (19.30%), consolidation stage (22.81%), and sustainability stage (17.54%). This study concludes that the community supervisory group Duurstede requires comprehensive institutional strengthening, particularly in the provision of infrastructure, operational funding, and capacity-building for its members. The government and supporting institutions are recommended to enhance guidance, training, and facility support to improve the effectiveness of the community supervisory groups in marine and fisheries resource surveillance.

Keywords: community supervisory group, resource surveillance, institutional, IDF, saparua.



Cara sitasi: Lopulalan, Y., & Anaktoty, Y. 2023. Tingkat Perkembangan Dan Prioritas Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas Duurstede Kecamatan Saparua. PAPALELE: Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, 9(2), 194-210., DOI: <https://doi.org/10.30598/papalele.2025.9.2.210/>

PENDAHULUAN

Masyarakat pesisir dapat meningkatkan hasil tangkapannya dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara optimum, jika sumber daya tersebut dapat dijaga dari tindakan pencurian dan perusakan. Terbatasnya jumlah pengawas perikanan dengan meluasnya kewenangan pengawasan, tingginya jumlah nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat perikanan yang setiap saat ada di lapangan dan melakukan usaha perikanan maka salah satu strategi pemerintah untuk mengelola sumberdaya perairan adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan. Peraturan-peraturan tersebut merupakan payung hukum bentuk pengawasan partisipatif dari masyarakat untuk membentuk Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya.

Pokmaswas adalah Kelompok Masyarakat Pengawas yang merupakan salah satu bentuk pengawasan yang melibatkan masyarakat. Masyarakat yang bersedia menjadi anggota Pokmaswas mengajukan diri secara suka rela, dan tidak mendapatkan gaji dalam menjalankan kegiatan Pokmaswas. Pokmaswas merupakan pelaksana pengawas ditingkat lapangan yang didalamnya terdiri dari unsur masyarakat, dimana kelompok tersebut dibentuk atas inisiatif masyarakat yang sadar akan pentingnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan yang mempunyai tugas untuk membantu pemerintah dalam upaya penyadaran hukum melalui sosialisasi dengan menggunakan prinsip 3M yaitu melihat, mencatat perikanan budidaya merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi yang cukup besar dalam memanfaatkan sumberdaya perairan seperti perikanan budidaya kolam,

karamba maupun budidaya ikan hias dalam akuarium (Irza, 2004). Salah satu cara untuk melihat kesejahteraan dari pembudidaya ikan di Pengawasan oleh Pokmaswas di tingkat lapangan dapat dilaksanakan dengan baik, tapi hal ini terkendala karena belum tersedia sarana dan prasarana pengawasan yang memadai. Kegiatan pengawasan dilakukan oleh kelompok masih terbatas hanya pada lokasi perairan dimana kelompok Pokmaswas berada. Dengan demikian Pokmaswas yang telah ada di Kecamatan Saparua perlu dikembangkan sesuai persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah sehingga tugas pokok dan fungsi kelompok dapat berjalan optimal.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Tujuan metode deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2014).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-Agustus 2024 dengan lokasi penelitian pada Kecamatan Saparua. Waktu dan kegiatan selama proses penelitian mencakup persiapan proposal, pengumpulan data, pengolahan data dan penyusunan laporan.

Jenis dan Metode Pengambilan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dengan observasi langsung (Sugiyono, 2018). Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan kuisioner dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan responden dalam hal



ini anggota Pokmaswas yang menjadi sasaran penelitian yang telah disusun sesuai dengan keperluan analisis dan tujuan penelitian. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2018). Data sekunder diperoleh dari referensi, publikasi ilmiah dan instansi terkait yang mendukung penelitian.

Metode Pengambilan Sampel

Populasi penelitian adalah anggota Pokmaswas Duurztede Kecamatan Saparua yang berjumlah 40 orang. Responden terdiri dari semua anggota Pokmaswas yang berada pada lokasi penelitian. Semua anggota Pokmaswas secara sengaja diambil dengan jumlah responden adalah 40 orang.

Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan kualitatif. Menurut Moleong (2007) bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan pengembangan institusi adalah analisis *Institutional Development Framework* (IDF) atau sering juga disebut dengan Kerangka Kerja Pengembangan Institusi (KKPI) yang adopsi dari Kirana dan Malik (2000). Analisis ini dibangun secara bertahap masing-masing : (1) menyusun matriks Kerangka Kerja Pengembangan Institusi (KKPI), (2) kalkulasi perkembangan institusi dan analisis grafis profil perkembangan institusi, (3) penentuan prioritas komponen kunci yang meliputi : skoring dan ranking prioritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Eksisting Pokmaswas Duurztede Kecamatan Saparua

Gambaran tentang Pokmaswas Duurztede Kecamatan Saparua, diuraikan berdasarkan kondisi eksisting yang teridentifikasi adalah:

1. Pokmaswas dibentuk dengan SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor 061/3097/2019k tanggal 6

Mei 2019. Ketua Pokmaswas Pelasona adalah Josep. F. Latumaerissa dengan jumlah anggota Pokmaswas sebanyak 12 orang.

2. Selama pembentukan Pokmaswas selalu ada pendampingan dari dewan pembina sehingga adanya kerjasama antara dewan pembina dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dalam memfasilitasi pemberdayaan Pokmaswas melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan bagi peningkatan kapasitas sumber daya manajemen manusia.
3. Pokmaswas selama ini sudah melaksanakan kemitraan tapi masih kurang, untuk itu masih perlu pengembangan kemitraan yang lebih lagi antara Pokmaswas dengan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.
4. Isu-isu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (melakukan aktivitas pada zona inti) dilakukan Pokmaswas dengan melaksanakan pemantauan kerjasama Pokmaswas dengan masyarakat setempat.
5. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan Pokmaswas masih sebatas pemantauan secara pribadi baik anggota Pokmaswas yang pergi melaut maupun tidak.
6. Sarana prasana Pokmaswas tidak ada sehingga terbatas dalam melaksanakan pengawasan. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku diharapkan dapat memberikan sarana dan prasarana bagi Pokmaswas dalam melaksanakan tugas pengawas di lapangan.

Tingkat Perkembangan Pokmaswas Duurztede

Tingkat perkembangan Pokmaswas Duurztede didasarkan pada uraian yang menempatkan setiap sumber daya pada tingkat kemajuan yang variatif sesuai dengan eksisting di lapangan.

Dengan uraian di atas, maka penilaian dilakukan guna menentukan skor kemajuan (Y) pada setiap tingkat kemajuan. Berdasarkan hasil penilaian untuk karakteristik sumber daya pengembangan visi Pokmaswas Duurztede terdiri dari tujuh komponen kunci yang mana ketiga Pokmaswas untuk dua komponen kunci



berada pada tahap permulaan, dua komponen kunci berada pada tahap perkembangan, dua komponen kunci berada pada tahap konsolidasi dan dua komponen kunci berada pada tahap keberlanjutan.

Untuk komponen kunci peran aktif Pokmaswas Duurztede berada pada tahap konsolidasi. Skor kemajuan komponen pengembangan visi Pokmaswas Duurztede pada tabel 1 khususnya sumber daya struktur badan pengelola untuk komponen kunci penegakan hukum dan dewan pembina yang diakui berada pada tahap keberlanjutan, hal ini sangatlah baik untuk tetap dipertahankan.

Memajukan organisasi berada pada tingkat konsolidasi dimana sudah baik namun masih perlu sedikit perhatian untuk terus ditingkatkan. Kebijakan operasional berada pada tahap perkembangan yang mana menjadi perhatian khusus untuk kedepannya dapat ditingkatkan. Untuk komponen kunci peran aktif Pokmaswas Duurztede berada pada tahap konsolidasi. Untuk sumber daya visi organisasi dan pernyataan misi berada pada tahap permulaan yang mana harus mendapat perhatian khusus untuk ditingkatkan.

Tabel 1. Skor Kemajuan Sumber Daya Pengembangan Visi Pokmaswas

Karateristik Sumber Daya	Komponen Kunci	Skor Kemajuan (Y)			
		PMN	PKN	KSL	KBN
Pengembangan Visi					
	Pengakuan Hukum				3,50
	Dewan Pembina yang diakui				3,25
Struktur Badan Pengelola	Kebijakan Operasinal	2,00			
	Peran aktif		2,50		
	Memajukan Organisasi			2,50	
Visi dan Misi Organisasi	Visi Organisasi	1,00			
	Pernyataan Organisasi		1,00		

Keterangan : PMN=Permulaan, PKN=Perkembangan, KSL=Konsolidasi, KBN=Keberlanjutan

Hasil penilaian sumber daya manajemen Pokmaswas Duurztede dengan dua puluh satu komponen kunci. Skor kemajuan komponen sumber daya manajemen Pokmaswas Duurztede dapat disajikan pada tabel 2. Pokmaswas Duurztede memiliki delapan

komponen kunci yang berada pada tahap permulaan, delapan komponen kunci berada pada tahap perkembangan, satu komponen kunci berada pada tahap konsolidasi dan empat komponen kunci berada pada tahap keberlanjutan.

Tabel 2. Skor Kemajuan Sumber Daya Manajemen Pokmaswas Duurztede

Karateristik Sumber Daya	Komponen Kunci	Skor Kemajuan (Y)			
		PMN	PKN	KSL	KBN
Sumber Daya Manajemen					
Model Kepemimpinan	Alur pembuatan Keputusan	2,00			
	Partisipasi		3,00		
Perencanaan	Misi/Strategi jangka panjang		2,00		
	Alur perencanaan			3,75	
	Implikasi pada sumber daya		0,75		
Manajemen Partisipasi	Perencanaan sebagai alat yang bermanfaat		3,25		
	Pelimpahan wewenang yang memadai	2,00			
	Layanan masyarakat			3,75	
	Partisipasi kelompok		2,75		
	Kesamaan kepentingan	2,00			
	Transparansi			3,50	
	Jender dalam pengambilan keputusan	1,00			
	Pengguna sumber daya dan pengambil Keputusan		2,00		



Sistim Manajemen	Konsultasi dengan masyarakat	1,00
	Aliran komunikasi	2,75
	Sistim personalia	1,00
	Sisitim kearsipan	2,00
Sistim Monitoring dan Evaluasi	Prosedur administrasi	1,00
	Sistim monitoring dan evaluasi yang terintegrasi	1,00
	Sistim monitoring pengolahan SDA yang melibatkan masyarakat	1,00
	Umpam balik dari penerima manfaat	1,00

Keterangan : PMN=Permulaan, PKN=Perkembangan, KSL=Konsolidasi, KBN=Keberlanjutan

Hasil penilaian dari skor kemajuan sumber daya manusia pada Pokmaswas Duurztede terdiri dari delapan komponen kunci. Pokmaswas Duurztede terdapat dua komponen kunci yang berada pada tahap permulaan, tiga komponen kunci yang berada pada tahap perkembangan, satu komponen kunci pada tahap konsolidasi dan dua komponen kunci pada tahap keberlanjutan. Hasil ini menunjukan bahwa karakteristik sumber daya pengembangan dan ketrampilan anggota pada komponen kunci kemampuan/ketrampilan dan keahlian anggota yang berada pada tahap permulaan yang mana perlu mendapat perhatian khusus sehingga

dapat segera ditingkatkan. Untuk komponen kunci pengembangan profesi, penilaian kinerja dan komposisi dewan pembina berada pada tahap perkembangan dimana mendapat perhatian khusus untuk dapat tingkatkan menjadi lebih baik kedepannya, Komponen kunci partisipasi anggota dalam manajemen berada pada tahap konsolidasi yang mana hal ini sudah baik namun masih perlu sedikit perhatian untuk kedepannya lebih ditingkatkan, Sedangkan pada komponen kunci pengangkatan anggota lokal dan komposisi anggota berada pada tahap keberlanjutan, hal ini sangatlah baik untuk dipertahankan.

Tabel 3. Skor Kemajuan Sumber Daya Manusia Pokmaswas Duurztede

Karateristik Sumber Daya	Komponen Kunci	Skor Kemajuan (Y)			
		PMN	PKN	KSL	KBN
Sumber Daya Manusia					
Pengembangan dan Ketrampilan Anggota	Kemampuan/Ketrampilan	1,00			
	Partisipasi Anggota dalam Manajemen			3,00	
	Keahlian Anggota	1,00			
	Pengembangan Profesi		2,00		
	Penilaian Kinerja		2,00		
Keterwakilan Masyarakat Lokal	Pengangkatan Anggota Lokal			4,00	
	Komposisi Anggota			4,00	
	Komposisi Dewan Pembina		2,00		

Keterangan : PMN=Permulaan, PKN=Perkembangan, KSL=Konsolidasi, KBN=Keberlanjutan

Hasil penilaian terhadap setiap komponen kunci sesuai karakteristik sumber daya keuangan terdiri dari tujuh komponen kunci, dimana tujuh komponen kunci semuanya berada pada tahap permulaan (Tabel 4). Dari tabel ini dapat dilihat

bahwa semua komponen kunci pada skor kemajuan keuangan Pokmaswas Pokmaswas Duurztede harus mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan.



Tabel 4. Skor Kemajuan Sumber Daya Keuangan Pokmaswas Duurztede

Karateristik Sumber Daya	Komponen Kunci	Skor Kemajuan (Y)			
		PMN	PKN	KSL	KBN
Sumber Daya Keuangan					
Pengelola Keuangan	Anggaran digunakan sebagai alat manajemen	1,00			
	Keshatan Keuangan	1,00			
	Transparansi Keuangan	1,00			
	Pengendalian Kas	1,00			
	Audit	1,00			
	Penghimpunan Dana	1,00			
	Kesanggupan Keuangan	1,00			

Keterangan : PMN=Permulaan, PKN=Perkembangan, KSL=Konsolidasi, KBN=Keberlanjutan

Hasil penilaian terhadap setiap komponen kunci sesuai karateristik sumber daya eksternal yaitu kemitraan/hubungan terdiri dari tujuh komponen kunci yang mana pada Pokmaswas Duurztede, satu komponen kunci berada pada tahap permulaan, satu komponen kunci berada pada tahap perkembangan, tiga komponen kunci berada pada tahap konsolidasi dan dua komponen kunci berada pada tahap keberlanjutan (Tabel 5). Hasil penilaian skor kemajuan pada Pokmaswas Duurztede berada pada tahap permulaan yang mana harus mendapat perhatian khusus untuk dapat

dingkatkan. Komponen kemampuan bekerja dengan masyarakat lokal berada pada tahap perkembangan yang mana mendapat perhatian khusus perhatian untuk dapat ditingkatkan. Publik mengenal organisasi, advokasi masyarakat lokal dan kemampuan kerjasama dengan NGO berada pada tahap konsolidasi dimana hanya perlu sedikit perhatian untuk dapat ditingkatkan lagi. Komunikasi badan pengelola dan kemampuan bekerja dengan pemerintah berada pada tahap keberlanjutan yang mana baik untuk tetap dipertahankan.

Tabel 5. Skor Kemajuan Sumber Daya Eksternal Pokmaswas Duurztede

Karateristik Sumber Daya	Komponen Kunci	Skor Kemajuan (Y)			
		PMN	PKN	KSL	KBN
Sumber Daya Eksternal					
Kemitraan/Hubungan Masyarakat	Publik mengenali organisasi			2,50	
	Kemampuan bekerja dengan masyarakat lokal		2,00		
	Advokasi masyarakat lokal			2,50	
	Komunikasi badan pengelola				3,50
	Kemampuan bekerja dengan Pemerintah				3,75
	Kemampuan mengakses sumber daya lokal	1,00			
	Kemampuan kerja sama dengan NGO			2,50	

Keterangan : PMN=Permulaan, PKN=Perkembangan, KSL=Konsolidasi, KBN=Keberlanjutan

Hasil penilaian terhadap setiap komponen kunci sesuai karateristik sumber daya pengawasan kelautan dan perikanan pada Pokmaswas Duurztede dalam konteks kerangka kerja institusional adalah isu-isu spesifik pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang memiliki empat komponen kunci, dimana satu komponen kunci berada pada tahap permulaan dan tiga komponen kunci berada pada tahap konsolidasi (Tabel 6). Hasil penilaian skor kemajuan pada komponen kunci

pengambilan keputusan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berada pada tahap permulaan yang mana harus mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan. Untuk komponen kunci praktek-praktek pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, resolusi konflik atas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan pelaksanaan peraturan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berada pada tahap konsolidasi yang mana hal ini sudah baik namun



perlu sedikit perhatian untuk kedepannya lebih ditingkatkan.

Tabel 6. Skor Kemajuan Sumber Daya Pengawasan Kelautan dan Perikanan

Karateristik Sumber Daya	Komponen Kunci	Skor Kemajuan (Y)			
		PMN	PKN	KSL	KBN
Isu-Isu Spesifik Pengawasan Sumber Daya Perikanan					
Isu-Isu Spesifik Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengambilan Keputusan dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1,00			
	Praktek-Praktek Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		2,50		
	Resolusi Konflik atas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			2,50	
	Pelaksanaan Peraturan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				2,25

Keterangan : PMN=Permulaan, PKN=Perkembangan, KSL=Konsolidasi, KBN=Keberlanjutan

Hasil penilaian terhadap setiap komponen kunci sesuai karateristik sumber daya sarana dan prasarana pada Pokmaswas Duurztede yang terakhir dalam kerangka kerja institusional dengan tiga komponen kunci. Pokmaswas Duurztede memiliki dua komponen kunci pada tahap permulaan dan satu komponen kunci pada tahap konsolidasi (Tabel 7). Hasil penilaian skor kemajuan ini menunjukan bahwa Pokmaswas Duurztede, ruang kesekretariatan dan sarana kesekretariatan berada juga pada tahap permulaan mana harus mendapat perhatian khusus untuk segera

dingkatkan. Sedangkan komponen kunci peralatan pengawasan Pokmaswas Duurztede berada pada tahap konsolidasi dimana hanya membutuhkan sedikit perhatian untuk dapat ditingkatkan. Dengan memiliki sejumlah komponen-komponen kunci pada sumber daya ini maka sangatlah penting untuk dipahami dan dicermati dalam pengembangan kapasitas organisasi Pokmaswas yang merupakan organisasi yang melibatkan masyarakat dalam membantu menangani fungsi-fungsi pengawasan pada sumber daya kelautan dan perikanan.

Tabel 7. Skor Kemajuan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pokmaswas Duurztede

Karateristik Sumber Daya	Komponen Kunci	Skor Kemajuan (Y)			
		PMN	PKN	KSL	KBN
Sarana Prasana					
Pengembangan Kelembagaan	Ruang Kesekretariatan	1,00			
	Sarana Kesekretariatan	1,00			
	Peralatan Pengawasan			2,25	

Keterangan : PMN=Permulaan, PKN=Perkembangan, KSL=Konsolidasi, KBN=Keberlanjutan

Prioritas Pengembangan Pokmaswas Duurztede

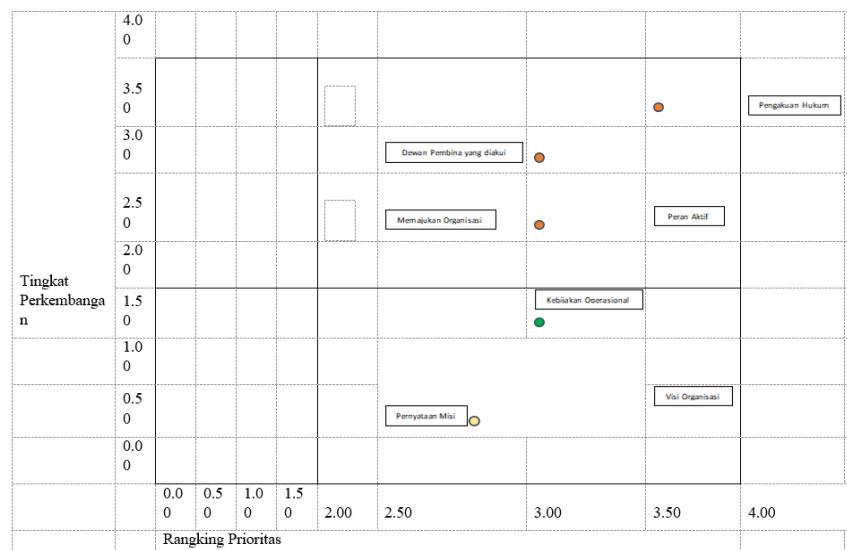
Menentukan rangking prioritas setiap komponen kunci sesuai sistim skoring yang telah ditentukan adalah cara untuk penetapan prioritas pengembangan organisasi Pokmaswas. Dengan mengakomodasi lembar skor yang dibuat bersama anggota Pokmaswas Duurztede, hasil skoring tersebut disesuaikan dengan hasil penilaian pada setiap komponen kunci. Satu komponen kunci dinilai sangat

penting, yang mana hidup matinya lembaga ditentukan olehnya. Enam komponen kunci dinilai penting untuk kelangsungan kerja lembaga. Hasil ini menunjukan bahwa secara keseluruhan sumber daya pengembangan visi Pokmaswas Duurztede untuk perangkingan prioritas memiliki nilai penting, dimana manjemen lembaga Pokmaswas Duurztede penting untuk kelangsungan kerja lembaga (Tabel 8)



Tabel 8. Rangking Prioritas Komponen Kunci Sumber Daya Pengembangan Visi

No.	Karateristik Sumber Daya	Komponen Kunci	Skor (X)
1	Struktur Badan Pengelola	Penegakan Hukum	4
		Dewan pembina yang diakui	3
		Kebijakan Operasional	3
		Peran Aktif	3
		Memajukan organisasi	3
2	Visi dan Misi Organisasi	Visi Organisasi	3
		Pernyataan Misi	3



Gambar 1. Rangking Prioritas Komponen Kunci Pada Sumber Daya Pengembangan Visi

Pokmaswas Duurztede (Gambar 1), pada kuadran I terdapat empat komponen kunci yaitu pengakuan hukum, dewan pembina yang diakui, peran aktif dan memajukan organisasi yang mana kinerja harus tetap dipertahankan. Komponen kunci kebijakan operasional berada di antara kuadran I dan IV, yang mana kinerja harus tetap dipertahankan atau kapasitas lembaga yang paling mendesak untuk segera ditingkatkan. Sedangkan untuk komponen kunci visi organisasi dan pernyataan misi berada pada kuadran IV yang mana kapasitas lembaga yang paling mendesak untuk segera ditingkatkan.

Hasil perangkingan prioritas setiap komponen kunci pada sumber daya manajemen Pokmaswas Duurztede (Tabel 9). Pokmaswas Duurztede untuk hasil skoring dimana tujuh komponen kunci memiliki nilai cukup penting, sebelas komponen kunci memiliki nilai penting dan tiga komponen kunci memiliki nilai sangat penting. Rata-rata setiap komponen kunci memiliki nilai yang beragam. Nilai semua

komponen kunci adalah penting yang mana penting untuk kelangsungan kerja lembaga.

Hasil rangking prioritas dan hasil skoring perkembangan komponen kunci pada sumber daya manajemen Pokmaswas Durzterde memiliki tujuh komponen kunci yakni partisipasi, alur perencanaan, perencanaan sebagai alat yang bermanfaat, layanan masyarakat, partisipasi kelompok, transparansi dan aliran komunikasi berada pada kuadran I yang mana kinerja harus tetap dipertahankan. Ada tiga komponen kunci yakni alur pembuatan keputusan, misi/strategi jangka panjang dan sistem kearsipan berada pada kuadran I dan IV yang mana kinerja harus tetap dipertahankan atau kapasitas lembaga yang paling mendesak untuk segera ditingkatkan.



Tabel 9. Rangking Prioritas Komponen Kunci Sumber Daya Manajemen

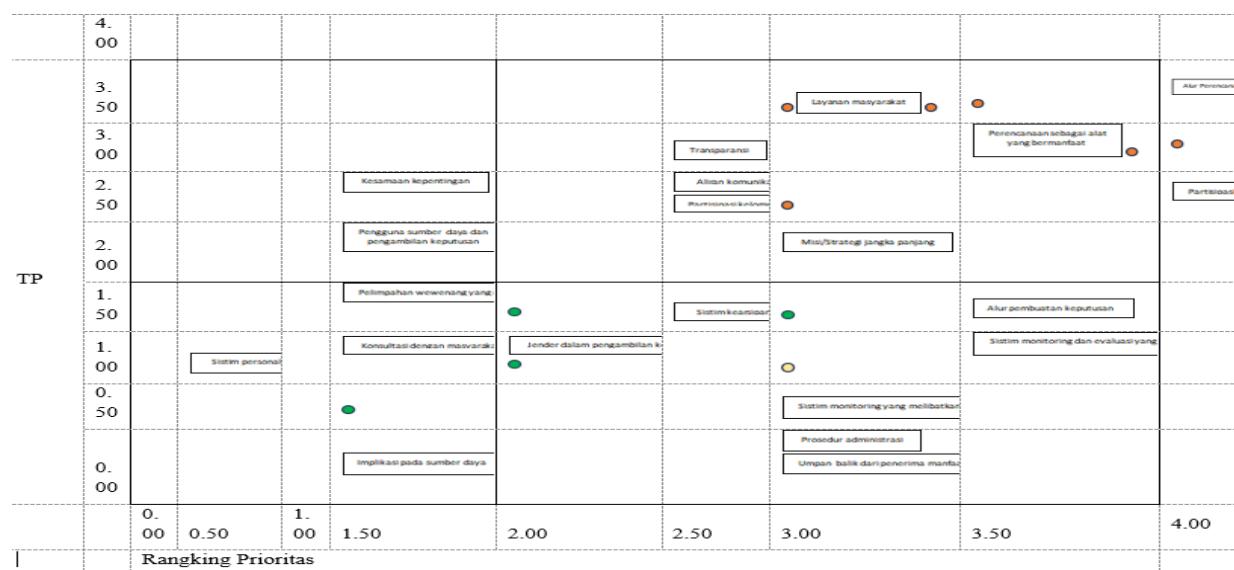
No	Karateristik Sumber Daya	Komponen Kunci	Skor (X)
1	Model Kepemimpinan	Alur pembuatan Keputusan	3
		Partisipasi	4
		Misi/Strategi jangka Panjang	3
2	Perencanaan	Alur perencanaan	4
		Implikasi pada sumber daya	2
		Perencanaan sebagai alat yang bermanfaat	4
		Pelimpahan wewenang yang memadai	2
		Layanan Masyarakat	3
		Partisipasi kelompok	3
3	Manajemen Partisipasi	Kesamaan kepentingan	2
		Transparansi	3
		Jender dalam pengambilan Keputusan	2
		Pengguna sumber daya dan pengambil keputusan	2
		Konsultasi dengan Masyarakat	2
		Aliran komunikasi	3
4	Sistem Manajemen	Sistem personalia	2
		Sistem kearsipan	3
		Prosedur administrasi	3
5	Sistem Monitoring dan Evaluasi	Sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi	3
		Sistem monitoring yang melibatkan Masyarakat	3
		Umpaman balik dari penerima manfaat	3

Tiga komponen kunci yakni pelimpahan wewenang yang memadai, kesamaan kepentingan dan pengguna sumber daya dan pengambil keputusan berada pada kuadran I, II, III dan IV yang mana kinerja harus tetap dipertahankan, tidak perlu dipermasalahkan, kinerja bagus, tidak terlalu mendesak untuk disempurnakan, bisa ditangani kemudian dan kapasitas lembaga yang paling mendesak untuk segera ditingkatkan. Empat komponen kunci yakni implikasi pada sumber daya, jender dalam pengambilan keputusan, konsultasi dengan masyarakat dan sistem personalia berada pada kuadran III dan IV yang mana dimana tidak terlalu mendesak untuk disempurnakan, bisa ditangani kemudian dan kapasitas lembaga yang paling mendesak untuk segera ditingkatkan. Sedangkan empat komponen kunci yakni prosedur administrasi, sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, sistem monitoring yang melibatkan

masyarakat dan umpan balik dari penerima manfaat berada pada kuadran IV yang mana kapasitas lembaga yang paling mendesak untuk segera ditingkatkan. Untuk Pokmaswas Duurztede semua komponen kunci berada pada posisi kuadran yang sama. Tingkat perkembangan dan rangking prioritas pada kedua Pokmaswas ini memiliki nilai yang sama hanya pada dua komponen kunci yaitu partisipasi kelompok dan transparansi yang memiliki nilai tingkat perkembangannya berbeda. Untuk komponen kunci partisipasi kelompok Duurztede memiliki nilai tingkat perkembangan 2,75. Sedangkan untuk komponen kunci transparansi Pokmaswas Duurztede 3,50.

Hasil penentuan rangking prioritas skor (x) dan hasil skoring perkembangan komponen kunci dalam sumber daya manajemen Pokmaswas Duurztede secara grafis diekspresikan dalam gambar 2.





Gambar 2. . Rangking Prioritas Komponen Kunci Sumber Daya Manajemen Pokmaswas Duurztede

Sumber daya manusia pada hasil perangkingan prioritas skor (X) yang ada dalam organisasi Pokmaswas Duurztede menunjukkan bahwa enam komponen kunci dinilai penting untuk kelangsungan kerja lembaga dan dua komponen kunci dinilai cukup

penting yang mana perlu mendapat perhatian khusus (Tabel 10). Secara keseluruhan hasil perangkingan prioritas menunjukkan bahwa sumber daya manusia Pokmaswas Duurztede memiliki nilai penting untuk kelangsungan kerja lembaga.

Tabel 10. Rangking Prioritas Komponen Kunci Sumber Daya Manusia

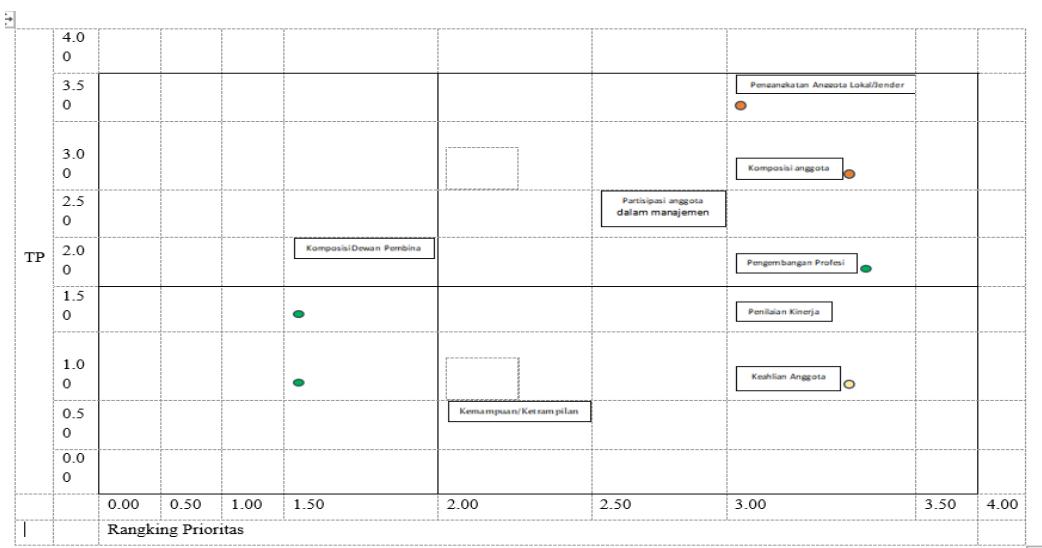
No.	Karateristik Sumber Daya	Komponen Kunci	Skor (X)
1.	Pengembangan dan Ketrampilan Anggota	Kemampuan/Ketrampilan	2
		Partisipasi Anggota dalam Manajemen	3
		Keahlian Anggota	3
		Pengembangan Profesi	3
		Penilaian Kinerja	3
		Pengangkatan Anggota Lokal/Jender	3
2.	Keterwakilan Masyarakat Lokal	Komposisi Anggota	3
		Komposisi Dewan Pembina	2

Hasil penentuan rangking prioritas dan hasil skoring perkembangan komponen kunci pada sumber daya manusia Pokmaswas Duurztede dapat digambarkan secara grafis (Gambar 6). Tiga komponen kunci yaitu partisipasi anggota dalam manajemen, pengangkatan anggota lokal/jender dan komposisi anggota berada pada kuadran I yang mana kinerja harus tetap dipertahankan. Pengembangan profesi dan penilaian kinerja merupakan komponen kunci yang berada di antara kuadran I dan IV yang mana kinerja tetap dipertahankan atau kapasitas lembaga yang paling mendesak untuk segera ditingkatkan. Satu komponen kunci yaitu komposisi dewan pembina berada di antara

kuadran I, II, III dan IV yang mana kinerja harus tetap dipertahankan, tidak perlu dipermasalahkan, kinerja bagus, tidak terlalu mendesak untuk disempurnakan, bisa ditangani kemudian dan kapasitas lembaga yang paling mendesak untuk segera ditingkatkan. satu komponen kunci yaitu kemampuan/ketrampilan berada antara kuadran III dan IV yang mana tidak terlalu mendesak untuk disempurnakan, bisa ditangani kemudian dan kapasitas lembaga yang paling mendesak untuk segera ditingkatkan dan satu komponen kunci yaitu keahlian anggota berada pada kuadran IV dimana kapasitas lembaga yang paling mendesak untuk segera ditingkatkan. Untuk sumber daya manusia Pokmaswas



Duurztede memiliki nilai yang sama baik pada rangking prioritas maupun tingkat perkembangan.



Gambar 3. Rangking Prioritas Komponen Kunci Sumber Daya Manusia Pokmaswas Duurztede

Hasil perangkingan prioritas pada sumber daya keuangan pada dan Pokmaswas Duurztede terlihat bahwa ada enam komponen kunci yang dinilai penting untuk kelangsungan kerja lembaga dan satu komponen kunci yang dinilai cukup penting yang mana perlu mendapat

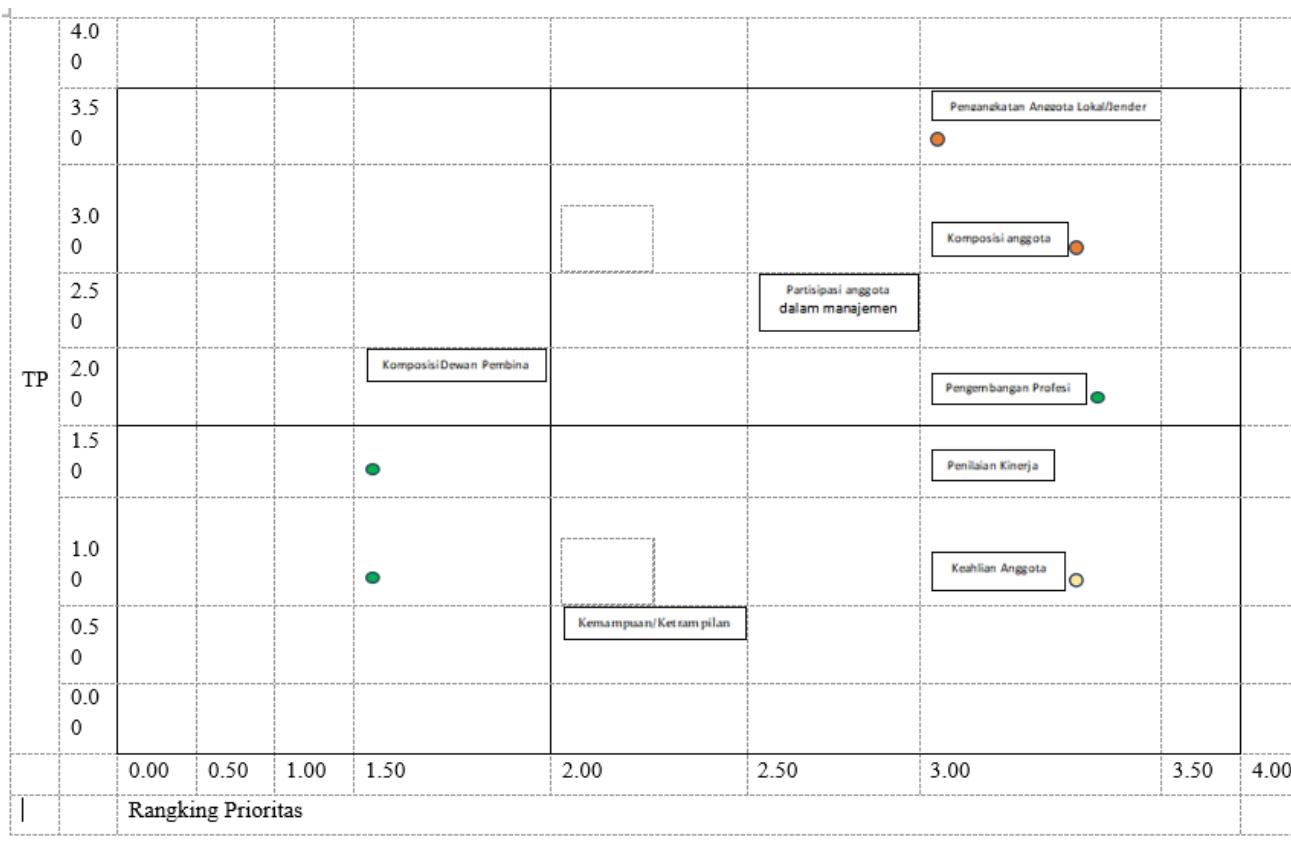
perhatian khusus (Tabel 11). Secara keseluruhan dari hasil perangkingan prioritas menunjukkan bahwa sumber daya keuangan Pokmaswas Duurztede memiliki nilai penting untuk kelangsungan kerja lembaga.

Tabel 11. Skor Kemajuan Sumber Daya Keuangan Pokmaswas

No.	Karateristik Sumber Daya	Komponen Kunci	Skor (X)
1	Struktur Badan Pengelola	Anggaran digunakan sebagai alat manajemen	3
		Kesehatan Keuangan	3
		Transparansi Keuangan	3
		Pengendalian Kas	3
		Audit	3
		Perhimpunan Dana	2
		Kesanggupan Keuangan	3

Secara grafis hubungan antara rangking prioritas dan skor pengembangan Duurztede untuk setiap komponen kunci pada sumber daya keuangan (Gambar 3) dengan enam komponen kunci yaitu anggaran digunakan sebagai alat manajemen, kesehatan keuangan, transparansi keuangan, pengendalian kas, audit dan kesanggupan keuangan berada pada kuadran IV yang mana kapasitas lembaga yang paling mendesak untuk segera ditingkatkan. Satu

komponen kunci perhimpunan dana berada pada kuadran III dan IV yang mana tidak perlu mendesak untuk disempurnakan, bisa ditangani kemudian dan kapasitas lembaga yang paling mendesak untuk segera ditingkatkan. Secara keseluruhan Pokmaswas Duurztede semua komponen kunci berada pada kuadran IV dengan nilai-nilai yang sama baik pada tingkat perkembangan maupun skor pada rangking prioritas.



Gambar 4. Rangking Prioritas Komponen Kunci Sumber Daya Keuangan Pokmaswas Duurztede

Hasil perangkingan pada skor (X) sumber daya eksternal Pokmaswas Duurztede ada tiga komponen kunci yang sangat penting dalam menentukan hidup mati lembaga dan empat komponen kunci yang dianggap penting untuk

kelangsungan kerja lembaga (Tabel 12). Secara umum untuk sumber daya eksternal Pokmaswas Duurztede komponen kunci memiliki nilai penting yang mana penting untuk kelangsungan kerja lembaga.

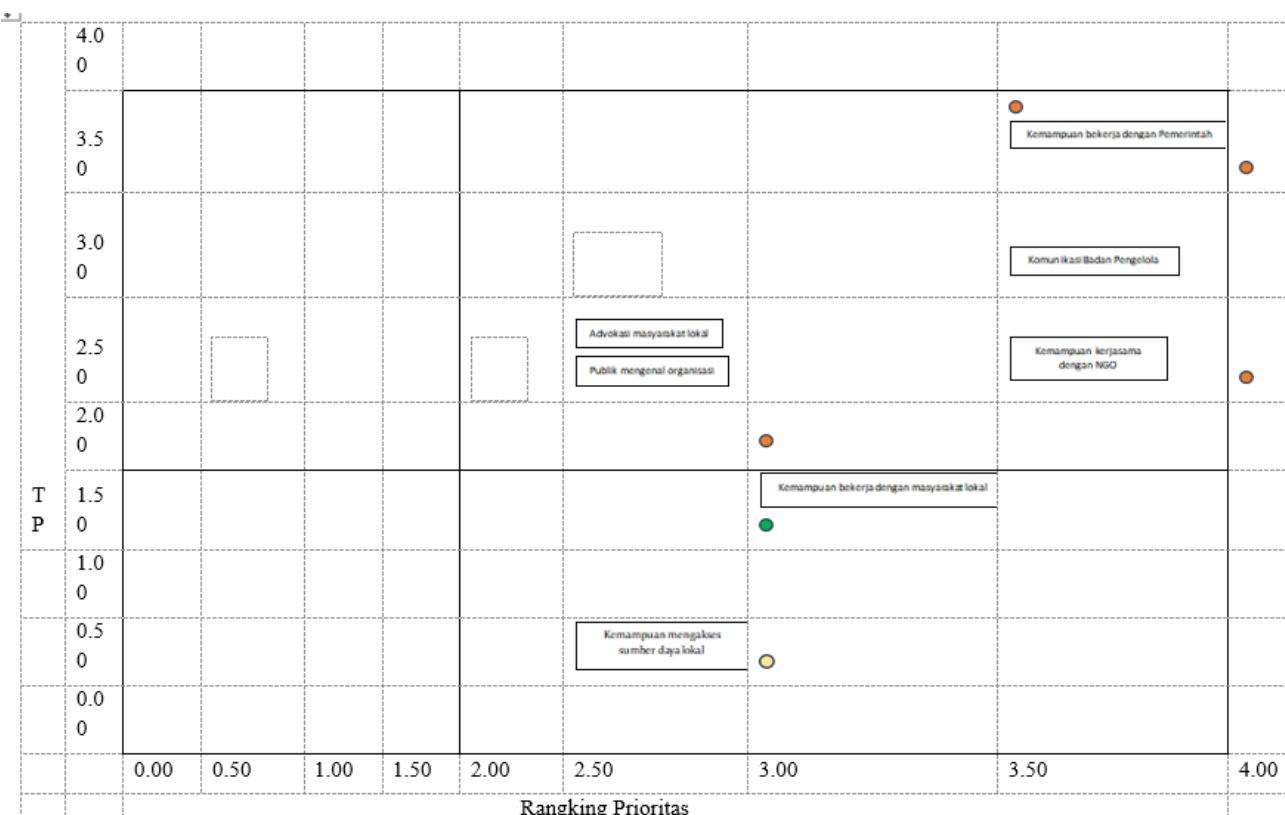
Tabel 12. Rangking Prioritas Komponen Kunci Sumber Daya Eksternal Pokmaswas Duurztede

No.	Karateristik Sumber Daya	Komponen Kunci	Skor (X)
1	Kemitraan/Hubungan Masyarakat	Publik mengenal organisasi	3
		Kemampuan bekerja dengan masyarakat lokal	3
		Advokasi masyarakat lokal	3
		Komunikasi Badan Pengelola	4
		Kemampuan bekerja dengan Pemerintah	4
		Kemampuan mengakses sumber daya lokal	3
		Kemampuan kerja sama dengan NGO	4

Hasil penentuan rangking prioritas dan hasil skoring perkembangan komponen kunci pada sumber daya eksternal Pokmaswas Duurztede dapat digambarkan secara grafis (Gambar 3). Pokmaswas Duurztede, lima komponen kunci yaitu kemampuan bekerja dengan pemerintah, komunikasi badan pengelola, kemampuan kerjasama dengan NGO, Advokasi masyarakat lokal dan publik mengenal organisasi berada pada kuadran I

yang mana kinerja harus tetap dipertahankan. Satu komponen kunci yaitu kemampuan bekerja dengan masyarakat lokal berada diantara kuadran I dan IV yang mana kinerja harus tetap dipertahankan atau kapasitas lembaga yang paling mendesak untuk segera ditingkatkan dan komponen kunci kemampuan mengakses sumber daya lokal berada pada kuadran IV yang mana kapasitas lembaga yang paling mendesak untuk segera ditingkatkan.





Gambar 5. Rangking Prioritas Komponen Kunci Sumber Daya Eksternal Pokmaswas

Sumber daya kelautan dan perikanan pada hasil perangkingan prioritas skor (X) pada Pokmaswas Duurztede menunjukkan bahwa tiga komponen kunci dinilai sangat penting karena menentukan hidup mati lembaga dan satu komponen kunci yang penting untuk

kelangsungan kerja lembaga (Tabel 13). Jadi secara keseluruhan pada komponen kunci pengawasan sumber daya kelautan Pokmaswas Duurztede memiliki nilai sangat penting dimana menentukan hidup mati lembaga.

Tabel 12. Rangking Prioritas Komponen Kunci Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

No.	Karateristik Sumber Daya	Komponen Kunci	Skor (X)
1	Isu-Isu Spesifik Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengambilan Keputusan dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3
		Praktek-Praktek Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	4
		Resolusi Konflik atas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	4
		Pelaksanaan Peraturan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	4

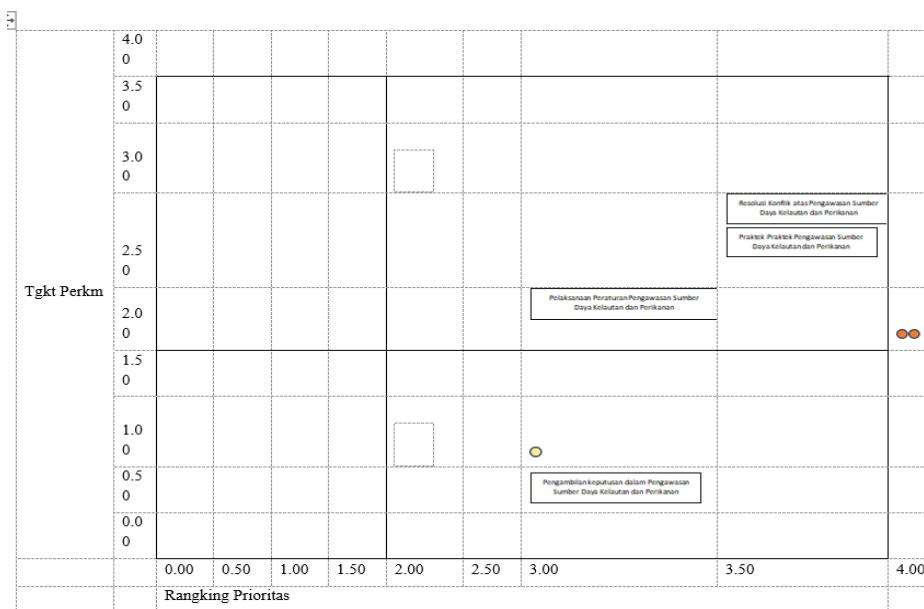
Secara grafis hasil penentuan rangking prioritas dan hasil skoring perkembangan komponen kunci pada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Pokmaswas Duurztede dapat disajikan pada gambar 4. Pokmaswas Duurztede juga ada tiga komponen kunci yaitu praktek-praktek pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, resolusi

konflik atas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan pelaksanaan peraturan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada pada kuadran I yang mana kinerja harus tetap dipertahankan. Satu komponen kunci yaitu pengambilan keputusan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berada pada kuadran IV yang mana



kapasitas lembaga yang paling mendesak untuk segera ditingkatkan. Walaupun pada ketiga Pokmaswas terlihat ada tiga komponen kunci

berada pada kuadran I tetapi memiliki nilai tingkat perkembangan yang berbeda.



Gambar 6. Rangking Prioritas Komponen Kunci Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Hasil perangkingan prioritas pada sumber daya sarana dan prasarana pada Pokmaswas Duurztede terlihat bahwa ada dua komponen kunci yang dinilai penting untuk kelangsungan kerja lembaga yaitu komponen kunci ruang kesekretariatan dan sarana kesekretariatan dan satu komponen kunci yaitu peralatan

pengawasan yang dinilai sangat penting menentukan hidup mati lembaga (Tabel 14). Hasil perangkingan prioritas sumber daya sarana dan prasarana memiliki nilai penting untuk kelangsungan kerja Pokmaswas dalam kegiatan pengawasan di lapangan.

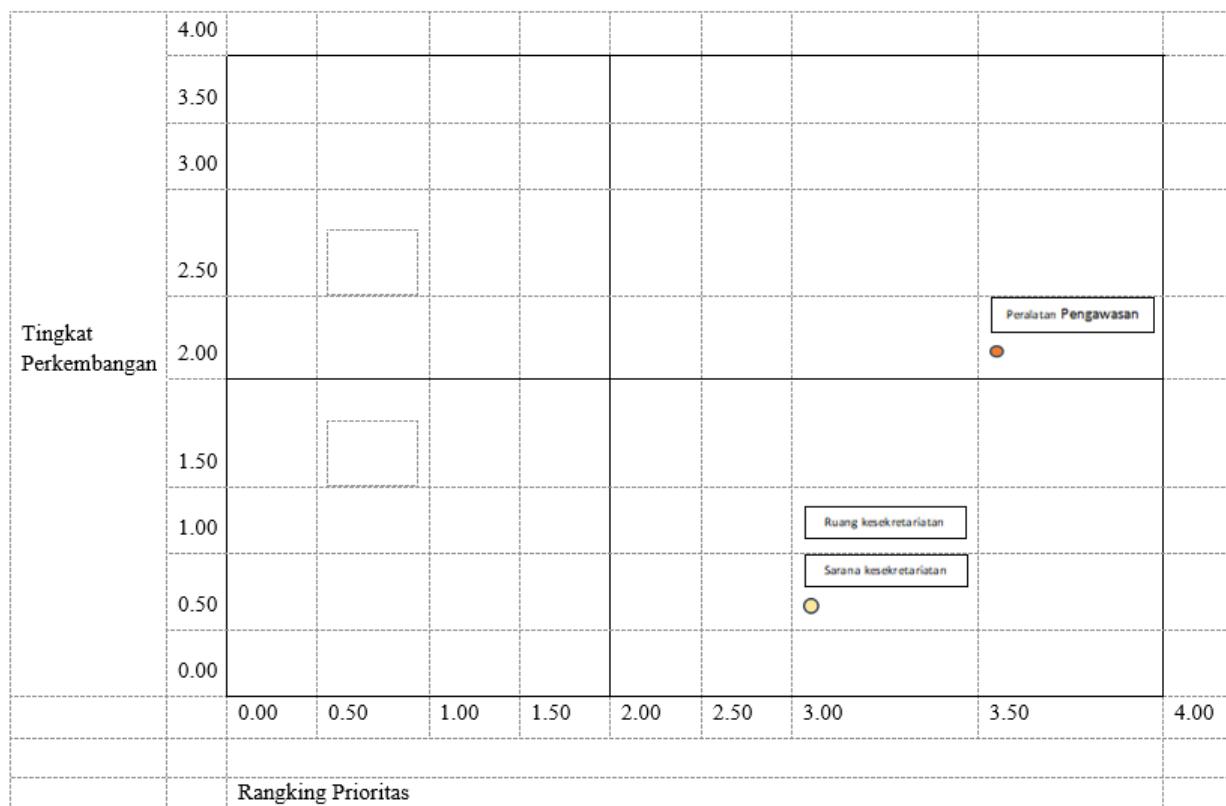
Tabel 14. Rangking Prioritas Komponen Kunci Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pokmaswas

No.	Karateristik Sumber Daya	Komponen Kunci	Skor (X)
1	Sarana dan Prasarana	Ruang Kesekretariatan	3
		Sarana Kesekretariatan	3
		Peralatan Pengawasan	4

Hubungan antara rangking prioritas dan skor perkembangan Pokmaswas Duurztede satu komponen kunci yaitu peralatan pengawasan berada pada kuadran I yang mana kinerja harus tetap dipertahankan dan dua komponen kunci yaitu ruang kesekretariatan dan sarana kesekretariatan berada pada kuadran IV yang mana kapasitas lembaga yang paling mendesak untuk segera ditingkatkan (Gambar 7). Ketersedianya sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam kegiatan pengawasan di lapangan. Secara keseluruhan hasil

perangkingan prioritas dari semua sumber daya pada setiap komponen kunci menunjukkan bahwa Pokmaswas Duurztede memiliki nilai penting dimana penting untuk kelangsungan kerja lembaga. Secara grafis hasil penentuan skoring prioritas pada Pokmaswas Duurztede menunjukkan bahwa komponen kunci pada kuadran I (40,35%), kuadran I dan IV (12,28%), kuadran I,II,II dan IV (7,02%), kuadran III dan IV (10,53%) dan kuadran IV (29,82%).





Gambar 7. Rangking Prioritas Komponen Kunci Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Rangking prioritas tertinggi pada Pokmaswas Duurztede berada pada kuadran I yang mana kinerja lembaga Pokmaswas Duurztede harus tetap dipertahankan sambil membenahi komponen kunci yang masih rendah/lemah. Suila (2023) mengatakan bahwa komponen kunci yang berada pada kuadran I yang merupakan kuadran aman kinerjanya perlu tetap dijaga dan dipertahankan agar kinerja tidak turun.

Pokmaswas Duurztede untuk hasil penentuan skoring prioritas memiliki nilai yang baik, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman dalam kegiatan pengawasan, kerjasama dengan pemerintah dan NGO sudah terjalin baik, partisipasi anggota, sumber daya manusia, publik mengenal organisasi dan lainnya

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sebuah komponen sumber daya institusi berada pada kemajuan yang beragam untuk tingkat perkembangan sumber daya Pokmaswas Duurztede 40,35%; komponen kunci pada tahap perkembangan Pokmaswas

Duurztede 19,30% ; komponen kunci pada tahap konsolidasi Pokmaswas Duurstede 22,81% ; komponen kunci tahap keberlajutan Pokmaswas Duurztede 17,54%. Ini berarti bahwa Pokmaswas Duurztede masih berada pada tahap permulaan yang mana perlu mendapat perhatian khusus untuk ditingkatkan.

Semua sumber daya pada setiap komponen kunci untuk hasil perangkingan prioritas Pokmaswas Duurztede memiliki nilai penting yang mana penting untuk kelangsungan kerja lembaga. Untuk hasil penentuan skoring prioritas pada ekspresi grafis Pokmaswas Duurztede berada pada kuadran I yang mana kinerja harus tetap dipertahankan.

Saran

Pengembangan sistem kelembagaan Pokmaswas secara umum hendaknya didukung dengan sumber daya keuangan, sumber daya sarana dan prasarana untuk peningkatan Pokmaswas. Perlunya peningkatan sumber daya manusia dengan melakukan pembinaan dan pelatihan oleh Dinas terkait dan lembaga-lembaga LSM.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah. A. N, Alfariz.A., 2021. *Literature Review* Potensi dan pengelolaan Sumber daya Perikanan laut di Indonesia. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia*. 8 (1) : Hal 131-142
- Anwar. M. F. 2022., Efektivitas Penerbitan sertifikat Kelayakan Pengolahan Dalam Pengelolaan Ikan Di Kota Ambon Provinsi Maluku. Asdaf Kota Ambon, Provinsi Maluku. Tesis. Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah. IPDN. Hal 3- 5.
- Badan Pusat Statistik., 2021. Maluku Tengah Dalam Angka 2021. Hal 45.
- Badan Pusat Statistik., 2021. kecamatan Saparua Dalam Angka 2021. Hal 41-42.
- Badan Pusat Statistik., 2023. Kecamatan Saparua Dalam Angka 2023. Hal 8 - 10.
- Bahasoan H, Hakim DB, Nurmalina R, Putri EIK., 2019. Tipologi dan Ketimpangan Antara Gugus Pulau dan Wilayah Pembangunan Di Provinsi Maluku. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. 7(2): 203 – 214.
- Budiman T. 2016. Peran Pokmaswas Dalam Mendukung Sumber Daya kelautan dan Perikanan. Direktur PSDKP. Disampaikan Pada Kegiatan Pembinaan Pokmaswas Di Provinsi kalimantan Utara. 8 Maret 2016.
- Dahuri. R., 2001. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Secara Terpadu. Penerbit : Pradya Paramita. Jakarta. Hal 189.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku., 2017. Data Pokmaswas di Maluku Tahun 2017. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku., 2022. Data Pokmaswas di Maluku Tahun 2022. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- Djogo. T., Sunaryo., Didik Suharjito. D., dan Sirait.M., 2003. Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri. Bahan Ajar 8. Penerbit *World Agroforestry Centre (ICRAF)*. Hal 2 - 4.
- Kaliky. P. I., 2022. Memahami Kehidupan Masyarakat Kepulauan di Maluku Dalam Perspektif Ekologi dan Etnografi Komunikasi. *International Journal of Demos*. 4 (2) : 696 - 703.
- KKBI., 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta
- Kirana. C., Malik. I., 2000 Kerangka Kerja Pengembangan Institusi, Manual Untuk Pengguna. Diadaptasi dari *An Intergrade Toolkit For Institutional Development*. Mark Renzi, *Management System International*. BSP Kumala. Jakarta.
- Koko. A., Susatya. A., dan Apriyanto. E., 2019. Persepsi dan Partisipasi Nelayan Dalam Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Sekunyit Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Program Pascasarjana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Bengkuu. *Jurnal Naturalis*. 8 (1) : 49-58.
- Marasabessy. I., Fahrudi. A., Imran. Z., dan Agus. S. B., 2018. Strategi Pengelolaan Keberlanjutan Pulau Nusa Manu dan Nusa Leun di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. *Journal of Regional and Development Palnning*. 2 (1) : 1-22.
- Moleong. L. J., 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Rosdakarya.
- Morrison. T., 2001. *Actoinable Learning – A Handbook For Capacity Building Through Case Based Learning*. ADB Institute.
- Nasution. Z., Indah. B. V., dan Nurkaili., 2018. Kesiapan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dalam Mendukung Pengelolaan Program *Restocking Lobster*. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*. 10 (1) : 33-42.
- Negeri Hukurila., 2021. Profil Negeri Hukurila Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon.
- Nuari. F. R., Diamantina. A., dan Soemarni. A., 2022. Implementasi Tugas Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan Terhadap Kegiatan Penangkapan Ikan yang Dilakukan Oleh Nelayan Kecil Di Kota Semarang Diponogoro. *Law Journal*. 11 (2) : 202-245.



- Ondara. K., Wisha. U. J., dan Rahmawan. G. A., 2019. Karateristik Hidrodinamika Di Perairan Teluk Ambon Untuk Mendukung Wisata Selam. *Jurnal Kelautan*. 10 (1) : 14-16
- Papilaya. R. L., 2022. Wisata Pantai Tihulessy – Negeri Hukurila, Kota Ambon. *Warta Iktiologi*. 6 (1) : 14-16.

